ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Ditulis oleh:

Nama	: Adim Windi Yad'ulah
No Mahasiswa	: 18313342
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1

Program studi ekonomi pembangunan,

pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama	: Adim Windi Yad'ulah
NIM	: 18313342
Prodi	: Ekonomi Pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh – sunguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiarisme seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai dengan peraturan yang ditentukan dan berlaku.

Yogyakarta, 23 Agustus 2024

Penulis



Adim Windi Yad'ulah

LEMBAR PENGESAHAN

Analisis Determinan Ketimpangan Regional Di Indonesia

Nama	: Adim Windi Yad'ulah
NIM	: 18313342
Program studi	: Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 4 Juli 2024

Telah disetujui dan disahkan

oleh Dosen Pembimbing



Aminuddin Anwar, S.E.,M.Sc.

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama	: ADIM WINDI YAD'ULAH
NIM	: 18313342
Judul Tugas Akhir	: ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015-2022
Dosen Pembimbing	: Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A

Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc. .....

Anggota Tim : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D. .....

Yogyakarta, 16 Agustus 2024

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK. 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN REGIONAL DI INDONESIA TAHUN 2015-2022

Disusun oleh : ADIM WINDI YAD'ULAH

Nomor Mahasiswa : 18313342

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 16 Agustus 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Aminuddin Anwar, SE.,M.Sc. .....

Penguji : Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

"Seorang mukmin itu adalah orang yang bisa menerima dan diterima orang lain, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menerima dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik – baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya" (HR Thabrani)

"Hidup untuk menjadi mata air"

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tersayang, Bapak A. Syaiful Junaidi dan Ibu Marwindah. Almarhumah Nenek Kamalijah, kakak Irma Ika Izzatul millah, Adi Mutohar, serta keponakan tersayang Rahagi Miqdad Kabbara. Terima kasih atas semua dukungan, kasih sayang, serta banyak hal yang mungkin penulis tidak pernah tau atas apa yang telah diupayakan selama ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebuah ungkapan rasa syukur serta bangga telah lahir dan hidup dari keluarga yang sangat mendukung penulis untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Tak pernah ada kata terlambat untuk membuat semuanya tersenyum bangga dan bahagia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Segala puji atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Determinan Ketimpangan Regional Di Indonesia. Sholawat serta salam terlimpahkan kepada jumjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, karena tanpa dukungan mereka skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Aminuddin Anwar, S.E.,M.Sc. sebagai dosen pembimbing skripsi dengan sabar dan perhatian sehingga mempermudah dalam mengerjakan skripsi.
2. Bapak Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D. sebagai kepala program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Johan Arifin S.E., M.Si., Ph.D. sebagai dekan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Sahabuddin Sidiq, S.E., MA. sebagai kepala jurusan Ekonomi Pembangunin Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra, Diana Wijayanti, M.si. sebagai dosen pembimbing akademik yang berkenan membimbing dalam hal akademik selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Bapak/ibu dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu dan arahan selama masa kuliah.
7. Punggawa Kagem Jogja beserta bunda Ayik yang selalu mendukung, memberikan kepercayaan, dan cerita bagi penulis selama enam tahun masa kuliah.

8. Sobat kata kita – kita yang telah menemani selama masa perkuliahan, Ikrar Aruming Wilujeng, Wanda Anggya Murda, Syahtriagum Syahrir, Hendrawan, dan Salsabilla Tiaratama Herin Wiraksa.
9. Terima kasih untuk matahari yang datang memberi arah untuk kembali melangkah dan hidup bersama harapan.
10. Lembaga pers mahasiswa Himmah online UII yang telah menerima dan memberikan banyak hal dalam sisi kehidupan.
11. Seluruh mahasiswa ekonomi pembangunan angkatan 2018 yang telah menerima dan bersosialisasi dengan baik. Semoga kita semua dapat menjadi apa yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME III

LEMBAR PENGESAHAN IV

HALAMAN MOTTO V

HALAMAN PERSEMBAHAN VIII

KATA PENGANTAR.....IX

DAFTAR ISI.....XI

DAFTAR GAMBAR.....XIV

DAFTAR TABEL XV

ABSTRAK XVI

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 8
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II 10

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....10
2.1 Kajian Pustaka..... 10

2.2 Landasan Teori 13
2.2.1 Ketimpangan Pendapatan 13
2.2.1.1 Gini Rasio 14
2.2.1.2 Kurva Lorenz 14
2.2.2 Kemiskinan 15
2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia 16
2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka 17
2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto 19
2.3 Kerangka Pemikiran 20
2.4 Hipotesis Penelitian 20

BAB III 22

METODE PENELITIAN 22
3.1 Penelitian dan Sumber Data 22
3.2 Definisi Operasional Variabel penelitian 22
3.2.1 Variabel Dependen 22
3.2.2 Variabel Independen 23
3.2.2.1 Kemiskinan 23
3.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia 23
3.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 23
3.2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto 23
3.3 Metode Analisis Data 24
3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel 24
3.3.2 Common Effect Model 24
3.3.3 Fixed Effect Model 25
3.3.4 Random Effect Model 26
3.4 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 26
3.4.1 Uji Chow 26
3.4.2 Uji Lagrange Multiplier 27
3.4.3 Uji Hausman 27
3.5 Koefisien Determinasi (R-Square) 28
3.6 Uji Signifikasi 28
3.6.1 Uji Simultan F (F-Test) 28
3.6.2 Uji Parsial T (T-Test) 29

BAB IV **30**

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN **30**
4.1 Deskriptif Data Penelitian 30
4.1.1 Statistik Deskriptif 30
4.2 Pengujian Model Common Effect, Random Effect, dan Fixed Effect 32
4.3 Pemilihan Model Regresi 33
4.3.1 Uji Chow 33
4.3.2 Uji Lagrange Multiplier 34
4.3.3 Uji Hausman 35
4.4 Estimasi Model *Fixed Effect* 36
4.5 Koefisien Determinasi (R-Square) 37
4.6 Pengujian Statistik 37
4.6.1 Uji Signifikasi Simultan (F Test) 37
4.6.2 Uji parsial T (T-test) 38
4.7 Analisis Ekonomi 39
4.7.1 Hubungan Dari Variabel Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Regional 39
4.7.2 Hubungan Dari Variabel Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Regional 40
4.7.3 Hubungan Dari Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Regional 41
4.7.4 Hubungan Dari Variabel Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan Regional 43

BAB V **45**

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI **45**
5.1 Kesimpulan 45
5.2 Implikasi 46

DAFTAR PUSTAKA **47**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik gini ratio di Indonesia (dalam persen) 2
Gambar 1.2. Grafik kemiskinan di Indonesia (dalam persen) 3
Gambar 1.3. Grafik indeks pembangunan manusia di Indonesia (dalam persen)..... 5
Gambar 1.4. Grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (dalam persen) 6
Gambar 1.5. Grafik produk domestik regional bruto (dalam miliar)..... 7
Gambar 2.6. Kurva Lorenz..... 15
Gambar 2.7. Kerangka pemikiran 20

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil statistik deskriptif 31
Tabel 4.2 Hasil Pengujian RE, FE, dan CE 32
Tabel 4.3 Hasil uji chow 33
Tabel 4.4 Hasil lagrange multiplier..... 34
Tabel 4.5 Hasil hausman 35
Tabel 4.6. Hasil estimasi fixed effect..... 36

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan regional di Indonesia tahun 2015 hingga 2022. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini diantaranya ialah kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah regresi panel data dengan menggunakan model *fixed effect* sebagai model yang terpilih dengan bantuan *Eviews* 12. Secara simultan variabel kemiskinan positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Sedangkan variabel IPM, TPT dan PDRB berpengaruh negatif terhadap ketimpangan di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2022.

Kata kunci: *ketimpangan regional*, *kemiskinan, IPM, TPT, PDRB.*

BAB I

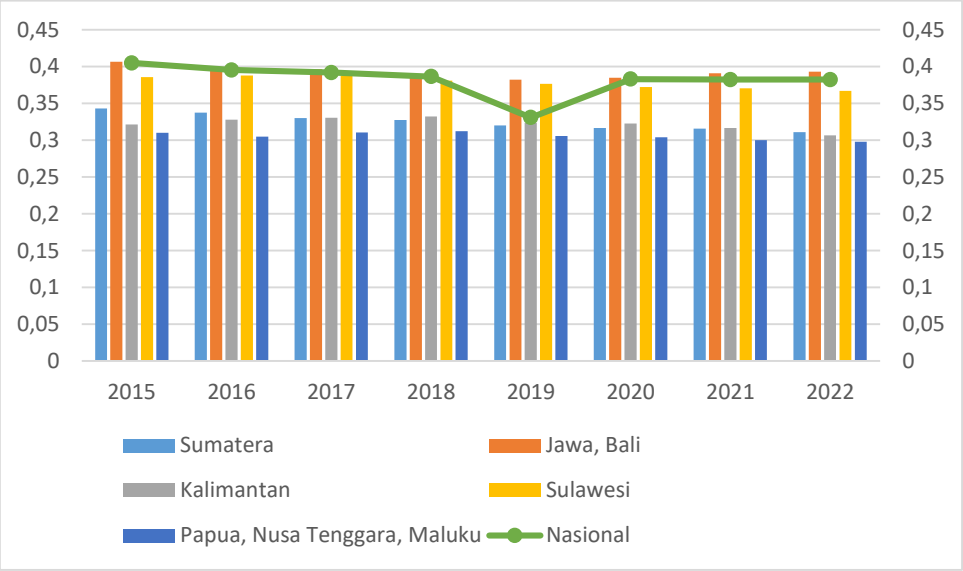
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah tersendiri bagi negara – negara berkembang. Masalah seperti ketimpangan dan ketimpangan ekonomi merupakan dua masalah besar yang sering dihadapi negara-negara berkembang. Distribusi pendapatan yang tidak merata antara kelompok berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah (Tambunan, 2001). Menciptakan kesejahteraan ekonomi di dalam sebuah negara merupakan tujuan pokok atas pembangunan ekonomi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut (Sjahrir, 1986) pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahap pembangunan memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural. Pada umumnya masalah ketimpangan pendapatan diakibatkan karena minimnya penghasilan yang didapat oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Tren ini tidak hanya menyoroti perbedaan individu dalam hal pendapatan, tetapi juga memiliki potensi untuk berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, kesenjangan yang lebih besar dapat menyebabkan permasalahan ekonomi, kecemburuan sosial, kerentanan terhadap disintegrasi dan kejahatan. (BPS DIY dan Bappeda DIY, 2020). Menjadi dilema tersendiri ketika pemerintah berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan lebih khusus terhadap kesenjangan atau ketidakrataan ekonomi.

Para peneliti terdahulu mendefinisikan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai suatu fenomena dimana terdapat permasalahan kesenjangan pendapatan antara penduduk dan daerah yang mengalami kemajuan pembangunan dengan daerah yang mengalami perlambatan pembangunan. Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan (Riandi, 2020). Berikut ini

data dari Badan Pusat Satatistik (BPS) yang menampilkan data gini rasio seluruh provinsi di Indonesia mulai tahun 2015 – 2022 yang memiliki prosentase berkisar 0 hingga 1. Apabila mendekati 0 maka ketimpangan rendah namun apabila mendekati 1 maka ketimpangan termasuk tinggi.



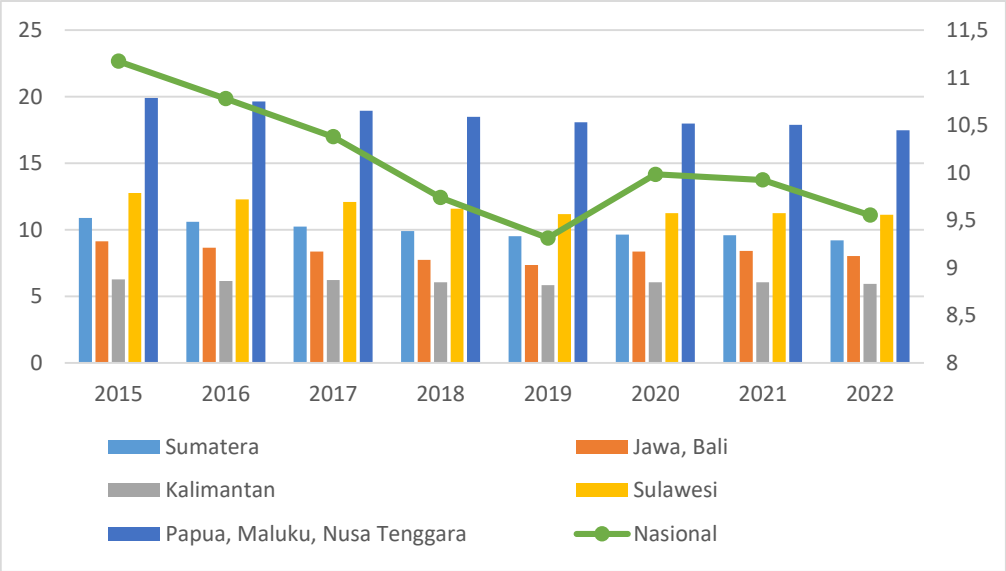
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2024

Gambar 1.1. Grafik gini ratio di Indonesia (dalam persen)

Dari data yang dihimpun dan diolah dari BPS di atas dapat diketahui bahwa bagaimana tingkat ketimpangan yang terjadi di pulau – pulau besar di Indonesia. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada periode 2015 – 2022 pada umumnya terjadi dengan prosentase yang relatif hampir sama dari tahun ke tahun. Rata – rata ketimpangan tertinggi terjadi di Jawa dan Bali pada tahun 2015 dengan nilai 0,34 persen. Sedangkan ketimpangan terendah dalam periode yang sama terjadi di Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku pada tahun 2022 dengan presentase 0,29 persen. Hal ini berarti bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2022 terbilang sedang.

Kemiskinan merupakan gambaran dari wujud negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi persoalan yang harus disorot oleh pemerintah karena menggambarkan ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum. Hingga saat ini, pemerintah belum berhasil mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas. Meskipun pemerintah berhasil menerapkan strategi pembangunan, terdapat kritik bahwa keberhasilan pembangunan tidak merata dan kesenjangan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Wibowo, 2016).

Permasalahan kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah partisipasi dan tingkat pendidikan. Pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan formal, berlangsung pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan pendidikan yang ingin dicapai, dan keterampilan peserta didik yang ingin dikembangkan. Berikut ini adalah prosentase kemiskinan di Indonesia

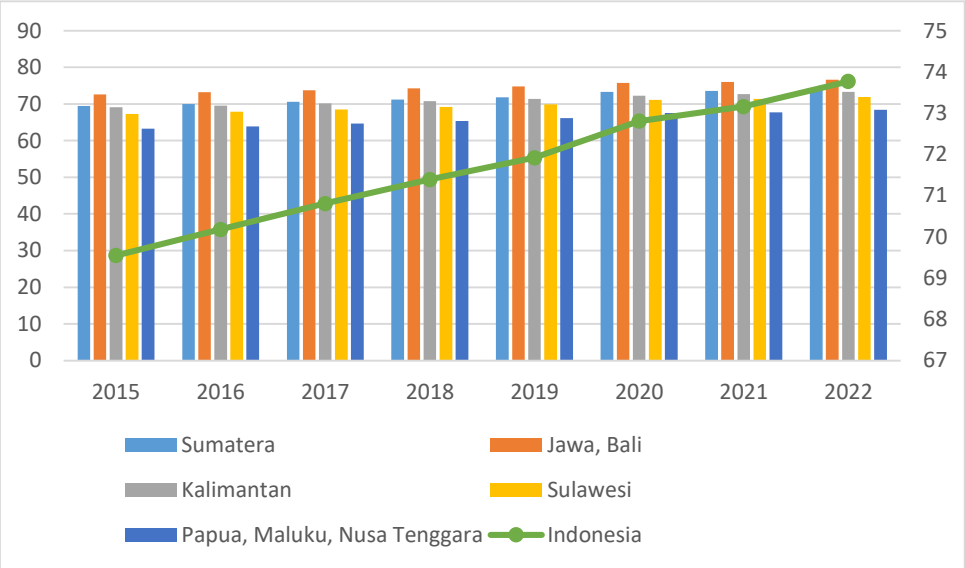


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2024

Gambar 1.2. Grafik kemiskinan di Indonesia (dalam persen)

Dari data di atas menunjukkan bahwa Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku menjadi bagian Indonesia yang masih memiliki sebagian besar penduduk miskin dalam periode 2015 – 2022 dengan prosentase tertinggi yaitu 19,9 persen pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2022 dengan prosentase 17,4 persen. Data ini menunjukkan betapa tingginya angka kemiskinan di Indonesia bagian timur apabila dilihat dari rata – rata kemiskinan secara nasional, Indonesia bagian timur masih terpaut 8,4 persen. Sedangkan secara nasional, prosentase kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai 11,1 persen sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019 dengan 9,3 persen. Kondisi ini berdampak bagi sebagian masyarakat yang kesulitan mengakses kebutuhan primer mereka.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup masyarakat melalui tiga aspek yaitu: akses pendidikan yang baik, angka harapan hidup yang panjang, dan standar hidup yang layak. IPM mempunyai dampak penting dalam memahami distribusi pendapatan di masyarakat. Selain itu, peningkatan IPM juga dapat memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan individu, mereka memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang (Sahal, 2023). Seperti halnya di dalam buku (Ismail, 2012) yang dituliskan teori dari Gary S. Becker tentang *human capital* dikatakan bahwa dalam modal manusia investasi yang paling penting berada pada pendidikan, pelatihan, dan kesehatan.

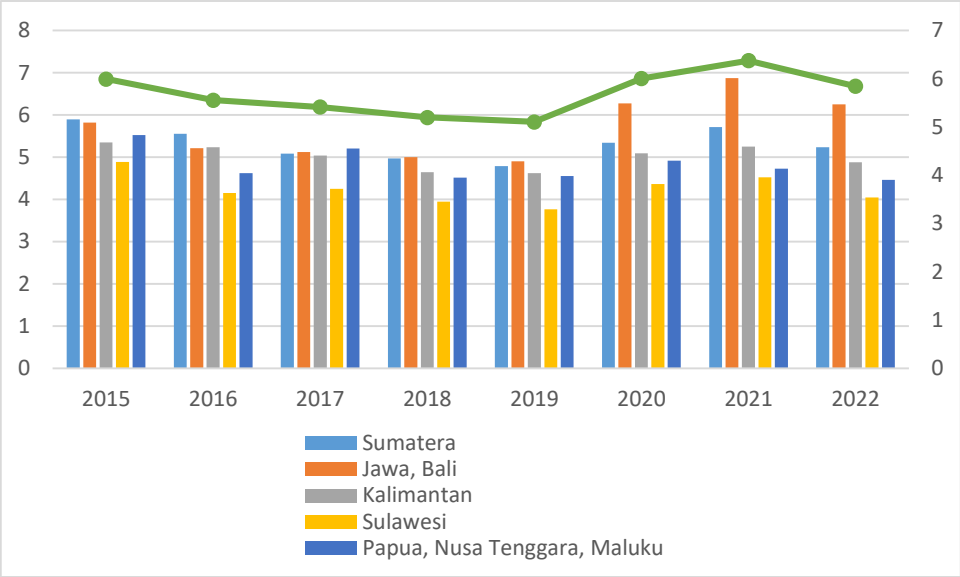


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2024

Gambar 1.3. Grafik indeks pembangunan manusia di Indonesia (dalam persen)

Apabila dilihat dari grafik di atas, terjadi tren kenaikan IPM secara nasional dari tahun 2012 hingga 2022. Namun apabila dilihat dari data yang lebih terperinci, IPM tertinggi terdapat di Pulau Jawa tepatnya ada di Provinsi Jakarta dengan prosentase 82,7 persen di tahun 2022, Provinsi Jakarta dari tahun 2012 hingga 2022 merupakan provinsi dengan IPM tertinggi dengan 80 persen. Sedangkan IPM terendah terdapat di Pulau Papua, Provinsi Papua memiliki IPM dengan prosentase 55,5 persen pada tahun 2012, walaupun dirata – rata hingga tahun 2022, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan prosentase IPM terendah di Indonesia dengan 58,9 persen.

Pengangguran di Indonesia masih menjadi masalah tersendiri. Tidak imbangnya lapangan kerja dengan permintaan pekerjaan membuat jumlah pengangguran terbuka menjadi bertambah. Menurut (Sukirno, 2004) efek buruk pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

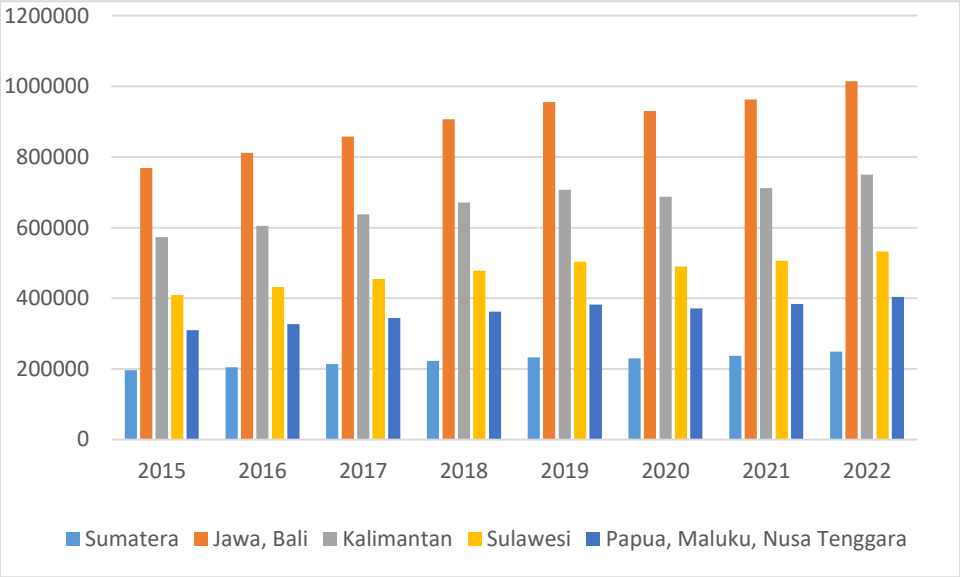


Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2024

Gambar 1.4. Grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia (dalam persen)

Dari gambar di atas menunjukkan bagaimana fluktuasi tingkat pengangguran terbuka di berbagai pulau besar di Indonesia dan akumulasi nasional dalam kurun waktu 2015 – 2022. Terjadi peningkatan jumlah pengangguran signifikan di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2019 ke tahun 2020 & 2021 dari 4,9 persen menjadi 6,2 persen dan 6,8 persen pada tahun 2021.

Produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan acuan penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah pada satu waktu tertentu atas dasar harga berlaku ataupun harga konstan. (Juliana, 2019) menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah produk domestik bruto. Di bawah ini adalah olahan grafik data produk domestik bruto Indonesia. Namun peningkatan produk domestik bruto berdampak pada ketimpangan pendapatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2024

Gambar 1.5. Grafik produk domestik regional bruto (dalam miliar)

Dari data di atas diketahui bahwa PDRB tertinggi terdapat di Pulau Jawa dan Bali pada tahun 2022 dengan Rp 10.142.12,84 miliar. Diikuti dengan Kalimantan Rp 7.497.24,93 miliar, Sulawesi Rp 5.329.69,27 miliar, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Rp 4.041.25,1 miliar, dan terakhir Sumatera Rp 2.487.27,16 miliar.

Dalam penelitian yang berjudul faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di pulau Jawa tahun 2014 – 2020. Di dalam penelitian tersebut terdapat variabel: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel TPT tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Variabel kemiskinan dan IPM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa (Farhan, 2022). Sedangkan pada penelitian (Wijayanti, 2023) yang berjudul Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa Tahun 2017 – 2022, dengan variabel: PDRB, IPM, Upah Minimum Regional (UMR), Indeks Pembangunan Teknologi dan Informatika (TIK) menyimpulkan bahwa produk domestik bruto dan IPM tidak berdampak terhadap ketimpangan di Pulau Jawa selama tahun 2017 – 2022. Upah minimum berdampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan. TIK berdampak positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian latar belakang dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang telah ditulis di atas, maka menjadi dasar pertimbangan penulis untuk membahas fenomena tersebut dalam penelitian dalam skripsi dengan judul "**Analisis Determinan Ketimpangan Regional Di Indonesia"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan regional di Indonesia?
b. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan regional di Indonesia?
c. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan regional di Indonesia?
d. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto terhadap ketimpangan regional di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kemiskinan, IPM, TPT, serta PDRB terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

a. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan regional di Indonesia?
b. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan regional di Indonesia?
c. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan regional di Indonesia?
d. Menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto terhadap ketimpangan regional di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademisi

   Dapat dijadikan sebagai refrensi penelitian berikutnya yang relevan dengan kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

b. Bagi instansi terkait

   Dapat memberikan sudut pandang baru untuk pengambilan kebijakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Menjelaskan peneltian terdahulu, landasan teori, menggambarkan kerangka pemikiran, dan hipotesis yang digunakan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan dengan seksama jenis dan sumber data, penjelasan variabel, dan metode yang digunakan didalam penelitian.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan secara komprehensif hasil penelitian disertai penjelasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Terdiri atas simpulan, implikasi hasil penelitian, daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas determinasi ketimpangan pendapatan atau sejenisnya di berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini penelitian – penelitian terdahulu yang menganalisis tentang analisis ketimpangan pendapatan yang terjadi di beberapa provinsi maupun nasional. Penulisan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk sebagai refrensi yang mendukung penelitian ini, juga sebagai pembanding untuk validitas analisis yang ada. Berikut ini penelitian yang dimaksud:

Penelitian dari (Wijayanti, 2023) tentang determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada tahun 2017 – 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan alat analisis data di enam provinsi di Pulau Jawa. Metode yang digunakan adalah data panel dengan model *fixed effect*. Variabel terikatnya adalah indeks gini, dan variabel bebasnya adalah: PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi (TIK). Hasil penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Pulau Jawa selama tahun 2017-2022. Upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Indeks Pembangunan TIK berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah, 2023) tentang determinan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2020. Metode yang digunakan adalah data panel dengan model random effect, dan data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS. Variabel terikatnya adalah indeks Gini, dan variabel bebasnya adalah produk domestik bruto (PDB), pendapatan asli daerah (PAD),

UMK dan jumlah penduduk, yang menentukan tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB, PAD, UMK dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun 2010-2020. Produk domestik bruto secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, PAD berpengaruh signifikan positif, UMK dan jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan.

Dalam penelitian (Aqilah, 2024) tentang determinan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Menggunakan metode panel data dengan random effect model. Variabel terikatnya adalah indeks Gini sedangkan variabel bebasnya adalah PDRB, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Persentase Penduduk Miskin dan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penelitian ini menganalisis bahwa Indeks Pemberdayaan Gender tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. PDRB dan tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Upah Minimum Provinsi (UMP) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan UMP yang tepat dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nurain, 2022) yang mengkaji penyebab ketimpangan pendapatan di lima provinsi paling timpang di Indonesia yang meliputi DIY, Gorontalo, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Papua. Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS dengan menerapkan metode data panel dengan regresi linier berganda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, IPM, UMP dan belanja modal pemerintah. Variabel terikatnya adalah indeks Gini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai koefisien negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena tingkat IPM yang tidak merata di beberapa daerah disebabkan oleh kurangnya fasilitas

pendukung seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. UMP mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Belanja modal pemerintah provinsi mempunyai dampak negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila, 2023) tentang pengaruh investasi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap distribusi ketimpangan pendapatan. Menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah investasi, IPM, dan TPT. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah indeks gini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks pembangunan manusia berdampak pada ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat pengangguran terbuka berdampak pada ketimpangan distribusi.

Dalam konteks ketimpangan, (Farhan, 2022) juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa dan menyatakan bahwa variabel TPT tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Variabel kemiskinan dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Dalam penelitian ini data sekunder digunakan dengan menggunakan metode data panel. Variabel terikatnya adalah indeks Gini sedangkan variabel bebasnya adalah TPT, kemiskinan dan IPM.

Selain itu (Sari, 2022) juga meneliti tentang ketimpangan pendapatan terhadap indeks pembangunan manusia. Pada penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, diantaranya variabel dependen yang menggunakan IPM, variabel independen menggunakan ketimpangan, serta variabel intervening yang menggunakan akses listrik di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses terhadap listrik di Indonesia, yaitu semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka semakin tinggi pula distribusi akses listrik yang dibutuhkan di Indonesia. Ketimpangan

pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui akses terhadap listrik di Indonesia, yaitu semakin tinggi ketimpangan pendapatan maka semakin tinggi pula distribusi akses terhadap listrik di Indonesia sehingga dapat meningkatkan IPM di Indonesia.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan antara dua kelompok dalam masyarakat. Dalam teori disparitas pendapatan menurut (Todaro, 2003) ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. (Piketty, 2014) menjelaskan dalam bukunya bahwa ketimpangan pendapatan meningkat ketika tingkat pengembalian modal lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ini disebabkan oleh akumulasi kekayaan yang lebih cepat ditangan pemilik modal dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari pekerja.

Ketimpangan merupakan ukuran jumlah penduduk yang tidak berfokus pada rumah tangga miskin. Menurut (Khandker, 2009), cara paling sederhana untuk mengukur ketimpangan adalah dengan mengurutkan penduduk dari yang termiskin hingga yang terkaya berdasarkan pengeluaran (atau pendapatan). Kemudian dikelompokkan menjadi lima atau sepuluh kelompok, dihitung masing – masing prosentase kelompok terhadap total pengeluaran. Dengan lima kelompok biasanya kelompok termiskin berada 6 – 10 persen dari total pengeluaran, sementara kelompok terkaya berkisar 35 – 50 persen.

2.2.1.1 Gini Rasio

Koefisien Gini adalah ukuran kesetaraan yang mencerminkan ukuran distribusi ketimpangan yang paling umum digunakan dalam masyarakat. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) hingga 1 (sangat tidak merata). Ketimpangan pendapatan rendah jika koefisien Gini berada di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan tergolong sedang jika koefisien Gini berkisar antara 0,3 dan 0,5. Ketimpangan pendapatan tinggi jika koefisien Gini berada di atas 0,5 (Wibowo, 2016). Berikut ini rumus menghitung rasio gini menurut BPS (2017)

$$\boldsymbol{GR = 1 - \sum fi\ [\ Yi + Yi - 1\ ]}$$

Keterangan:

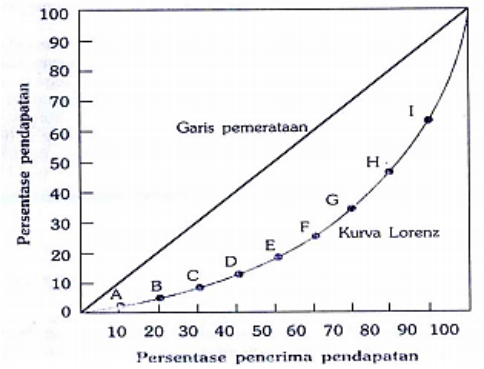
GR = Gini ratio

fi = Jumlah persen penerima pendapatan ke i

Yi = Jumlah kumulatif pendapatan pada kelas ke i

2.2.1.2 Kurva Lorenz

Distribusi pendapatan atau kekayaan dalam sebuah populasi dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz. Semakin jauh kurva Lorenz dari diagonalnya (merata), maka semakin terlihat ketimpangan. Kasus ketimpangan sempurna yang paling ekstrim, yaitu semua pendapatan hanya diperoleh oleh satu orang, akan menghasilkan kurva Lorenz yang berimpit dengan sumbu horizontal bawah dan sumbu vertikal kanan (Sahal, 2023)



Gambar 2.6. Kurva Lorenz

2.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan secara umum merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih layak. Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai cara: gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan memadai. Memadai disini bermakna berbeda – beda melintasi bagian – bagian politik dan ekonomi seluruh dunia. Kemiskinan juga biasa dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006).

Dalam teori yang dikemukakan (Nurkse, 1953) dijelaskan bahwa kemiskinan didasarkan pada teori lingkaran setan kemiskinan yang tercipta karena lemahnya pasar, kurangnya modal, dan keterbelakangan sumber daya manusia yang berujung pada kemiskinan dan produktivitas rendah. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan rendah menyebabkan penurunan investasi dan tabungan. Hak-hak dasar meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, keamanan dari perlakuan dan ancaman kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Farhan, 2022).

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks untuk mengukur pembangunan manusia berdasarkan seperangkat komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan ukuran kualitas hidup dan didasarkan pada pendekatan tiga dimensi: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan bermartabat. Ketiga dimensi ini mempunyai arti yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Untuk mengukur kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir; untuk mengukur pengetahuan digunakan kombinasi indikator angka kemampuan membaca dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak digunakan indikator daya beli masyarakat, berkaitan dengan serangkaian kebutuhan dasar yang diturunkan dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita dengan pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk masyarakat kehidupan yang layak. Semakin tinggi IPM maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya semakin sejahtera dan sebaliknya, apabila semakin rendah IPM, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya kurang sejahtera.

Menurut Mankiw, modal manusia adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan. Menurut Farhan, pembangunan manusia memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan suatu negara untuk mengadopsi teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. (Farhan, 2022).

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti menurunnya standar hidup mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pengangguran menjadi topik umum dalam perdebatan politik para politisi, yang sering berargumentasi bahwa kebijakan mereka akan membantu menciptakan lapangan kerja. (Gregory, 2000).

Pengangguran terbuka terjadi ketika seseorang menjadi bagian dari angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau dari kurangnya pengeluaran agregat (Sukirno, 1994).

Menurut teori pengangguran (Keynes, 1936), pengangguran dapat terjadi karena tingkat aktivitas ekonomi yang dapat dicapai selalu lebih rendah dibandingkan tingkat aktivitas ekonomi pada kesempatan kerja penuh. Persentase penduduk bekerja yang tidak bekerja disebut tingkat pengangguran. Persentase pengangguran inilah yang harus menjadi fokus dalam menangani permasalahan tersebut.

Pengangguran terbuka juga dapat dikaitkan dengan faktor – faktor lain seperti kurangnya pengeluaran agregat, kemajuan teknologi, dan kegiatan

ekonomi yang menurun. Faktor utama penyebab terjadinya pengangguran adalah kurangnya total pengeluaran. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut diperoleh ketika pengusaha dapat menjual barang dan jasa yang dihasilkannya. Semakin besar permintaan maka semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi. Peningkatan produksi akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja. (Sukirno, 1994)

Berdasar penyebabnya, pengangguran dibedakan menjadi empat: pengangguran konjungtur (siklis), struktural, friksional, dan musiman.

a. Pengangguran Siklis

   Pengangguran yang timbul karena kurangnya permintaan. Pengangguran ini muncul ketika, pada tingkat upah dan harga saat ini, total permintaan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pekerja yang tersedia dan menawarkan jasanya (Simanjuntak, 1985).

b. Pengangguran Struktural

   Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur pencari kerja ditinjau dari kualifikasi, bidang keahlian dan lokasinya dengan struktur permintaan tenaga kerja yang tidak terpenuhi (Subri, 2003).

c. Pengangguran Friksional

   Pengangguran friksional adalah pengangguran yang timbul akibat perubahan komposisi permintaan agregat dan masuknya pencari kerja ke dalam pasar tenaga kerja yang informasinya tidak sempurna sehingga memerlukan biaya modal (Simanjuntak, 1958).

d. Pengangguran Musiman

   Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi karena pada saat waktu – waktu tertentu dalam setahun. Biasanya pengangguran

musiman ini terjadi ketika pergantian musim, mislanya musim panen. Dan pengangguran ini bersifat sementara (Sukirno, 1994).

2.2.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memandang siapa pemilik faktor-faktor produksi tersebut, baik penduduk di wilayah tersebut maupun penduduk di wilayah lain (Sukirno, 1994).

PDRB dapat dihitung menggunakan dua metode: PDRB harga berlaku dan PDRB harga tetap. Penghitungan PDRB harga berlaku menggunakan harga barang dan jasa pada tahun berjalan sedangkan PDRB harga tetap dihitung menggunakan harga tahun dasar. PDRB harga berlaku mencerminkan kapasitas sumber daya ekonomi, pergeseran atau perubahan, serta struktur ekonomi suatu wilayah. Sedangkan PDRB harga tetap mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tahunan tanpa pengaruh faktor harga.

Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi menurut (Sukirno, 2007) adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{G = \frac{PDRB1 - PDRB0}{PDRB0} \times 100\%}$$

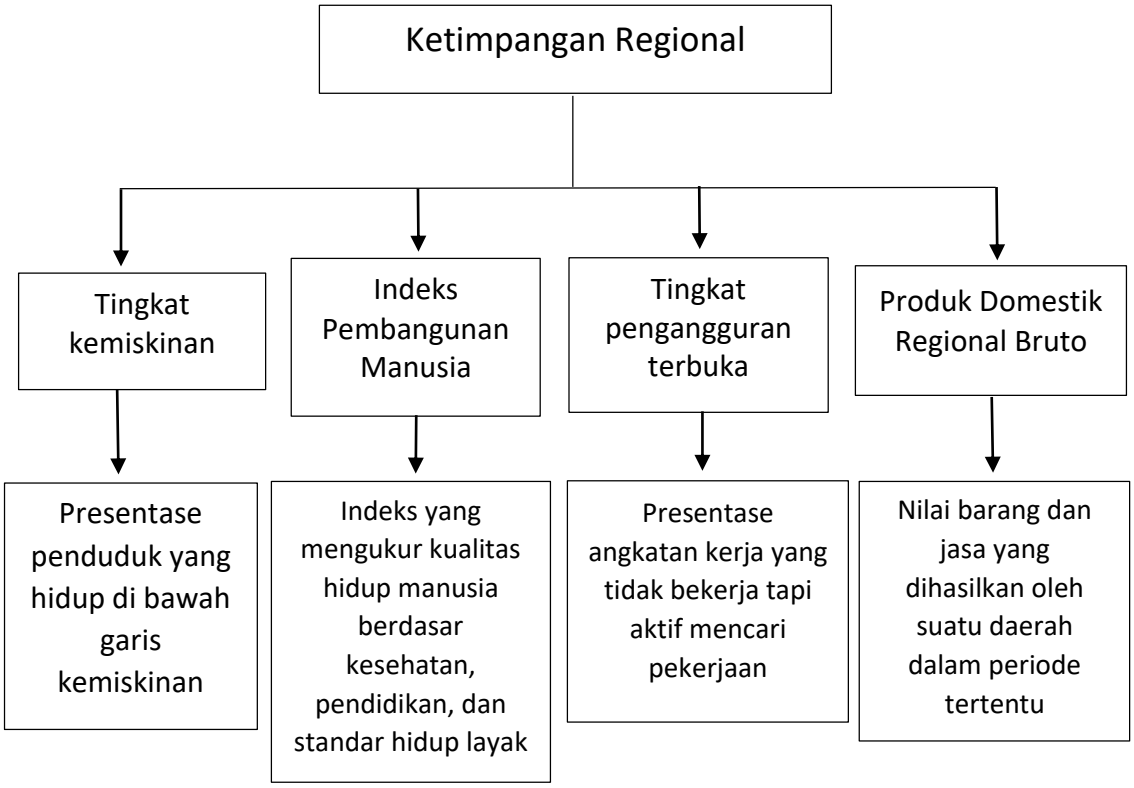
Keterangan:

G = Laju pertumbuhan ekonomi

$PDRB_1$ = PDRB ADHK tahun tertentu

$PDRB_0$ = PDRB ADHK tahun selanjutnya

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.7. Kerangka pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada uraian kajian pustaka dan landasan teori di dalam penelitian ini, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan regional di Indonesia.
2. Diduga tingkat indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan regional di Indonesia.
3. Diduga tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

4. Diduga produk domestik regional bruto memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan data panel yang berisi gabungan data *time series* dan *cross-sectional*. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik setiap tahunnya menurut 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2022. Data yang dihimpun dari BPS adalah: data gini rasio tahun 2015 – 2022, data kemiskinan tahun 2015 – 2022, data indeks pembangunan manusia tahun 2015 – 2022, data tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 – 2022, data produk domestik regional bruto tahun 2015 – 2022.

3.2 Definisi Operasional Variabel penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah gini rasio, sedangkan variabel independennya adalah kemiskinan, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto.

3.2.1 Variabel Dependen

Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa gini rasio berdasar 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Dalam penelitian ini sumber data gini rasio diperoleh dari badan pusat statistik diukur dengan prosentase.

3.2.2 Variabel Independen

3.2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan secara umum merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih layak. Sumber data yang diambil pada variabel penelitian ini diambil dari badan pusat statistik berdasar 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Data kemiskinan dalam penelitian ini diukur dengan prosentase.

3.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia dapat berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Data variabel ini berasal dari Badan Pusat Statistik berdasarkan 34 provinsi di Indonesia dengan periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 dan diukur dengan persentase pembangunan manusia.

3.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka terjadi ketika seseorang menjadi bagian dari angkatan kerja dan aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Dalam variabel ini menggunakan data berdasar 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu tahun 2015 hingga 2022. Data tingkat pengangguran terbuka yang diperoleh dari badan pusat statistik ini diukur menggunakan prosentase.

3.2.2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Produk domestik regional bruto adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Dalam variabel ini data diperoleh dari badan pusat statistik dari 34 provinis di Indonesia dengan rentang waktu

tahun 2015 hingga 2022. Data ini diukur menggunakan angka miliar rupiah.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang berisi kombinasi *time series* dan *cross-section*. Data panel ini menggabungkan beberapa informasi dari beberapa satuan yang diukur dalam jangka waktu berbeda.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, dimana metode regresi pada penelitian ini dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu pemilihan model estimasi, penentuan metode interpretasi dan interpretasi hasil. Metode estimasi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan sebagai berikut: *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Eviews 12.

Berikut ini bentuk model regresi data panel dalam penelitian:

$$\boldsymbol{Gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 Kemiskinan_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}}$$

3.3.1 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel terdapat tiga asumsi yang umum digunakan, yaitu pendekatan *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*.

3.3.2 Common Effect Model

Common effect model adalah model regresi data panel yang paling sederhana dan popular digunakan dalam analisis data panel. Model ini juga menggunakan pendekatan kuadran terkecil untuk mengestimasi parameter model. Sedangkan kelebihannya lebih mudah digunakan dan dapat menghemat derajat keabsahan, namun dapat menghasilkan gambaran yang tidak akurat jika terdapat perbedaan antara individu yang signifikan.

$$\boldsymbol{Gini_{it} = \beta_0 + \beta_1 Kemiskinan_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}}$$

Keterangan

i = cross section

t = time series

Metode ini mengasumsikan nilai intersep setiap variabel sama, begitu pula kemiringan koefisiennya. Metode ini sederhana, namun modelnya dapat merusak gambaran sebenarnya tentang hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas antar unit *cross-sectional* (Zainal, 2007).

3.3.3 Fixed Effect Model

Menurut (Zainal, 2007), pendekatan pemodelan efek tetap mengasumsikan bahwa intersep dan kemiringan (β) persamaan regresi (model) dianggap konstan baik pada unit *cross-sectional* maupun pada unit deret waktu. Salah satu cara untuk memperhitungkan unit *cross-sectional* atau unit deret waktu adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk memperhitungkan nilai parameter yang berbeda baik pada unit *cross-sectional* maupun pada unit deret waktu. Berikut rumus persamaan *fixed effect model*:

$$\boldsymbol{Gini_{it} = \beta_1 Kemiskinan_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \beta_5 D1_i \ldots + e_{it}}$$

Keterangan

D = *dummy*

3.3.4 Random Effect Model

(Widarjono, 2013) menjelaskan bahwa dimasukkannya variabel *dummy* pada model *fixed effect* bertujuan untuk merepresentasikan ketidaktahuan kita terhadap model sebenarnya. Namun, hal ini juga mempunyai efek mengurangi derajat kebebasan, yang pada gilirannya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan variabel perancu (istilah kesalahan) yang disebut metode efek acak. Keunggulan model *random effect* adalah kemampuannya dalam mengatasi heteroskedastisitas. Berikut ini adalah rumus persamaan *random effect model*:

$$\boldsymbol{Gini_{it} = \beta_1 Miskin_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PDRB_{it}}$$
$$\boldsymbol{+ v_{it} \dots\dots (2) v_{it} = e_{it} + ui}$$

Persamaan (2) merupakan persamaan untuk metode *random effect*. Cara ini disebut dengan metode *random effect* karena variabel pengganggu $\boldsymbol{v_{it}}$ terdiri dari dua komponen yaitu total variabel pengganggu $\boldsymbol{e_{it}}$. Dalam hal ini, variabel pengganggu $\boldsymbol{u_i}$ bervariasi antar individu tetapi tetap konstan sepanjang waktu.

3.4 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Dalam pemilihan teknik estimasi regresi data panel terdapat tiga uji terbaik diantaranya: uji Chow, Lagrange Multiplier, dan uji Hausman.

3.4.1 Uji Chow

Uji chow merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan atau memilih metode yang terbaik diantara *common effect model* atau *fixed effect model*. Yang mana pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas (p) untuk *cross section* F di dalam Eviews. Jika nilai p > 0,05 maka *common effect model* merupakan yang terpilih, sedangkan p < 0,05 maka model yang

terpilih adalah *fixed effect model*. Maka asumsi yang diujikan adalah sebagai berikut:

H0 = *Common Effect* merupakan model terbaik

Ha = *Fixed Effect* merupakan model terbaik

3.4.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan atau memilih metode yang terbaik diantara *common effect model* atau *random effect model*. Yang mana pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas (p) untuk Breusch Pagan dalam eviews. Jika nilai p > 0,05 maka *common effect model* merupakan yang terpilih, sedangkan p < 0,05 maka model yang terpilih adalah *random effect model*. Berikut asumsi uji Lagrange:

H0 = *Common Effect* merupakan model terbaik

Ha = *Random Effect* merupakan model terbaik

3.4.3 Uji Hausman

Model Hausman dirancang untuk membandingkan atau membandingkan *model fixed effect* yang besar dengan model *random effect*. Mayoritas responden menyatakan probabilitasnya (p) untuk *cross section random* dalam tampilan. Jika p > 0,05 maka model terbaik adalah model *random effect*, sedangkan jika p < 0,05 maka model terbaik adalah model *fixed effect*. Maka asumsi uji hausman sebagai berikut:

H0 = *Random Effect* merupakan model terbaik

Ha = *Fixed Effect* merupakan model terbaik

3.5 Koefisien Determinasi (R-Square)

R-squared merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. R-squared mempunyai nilai antara 0 dan 1 yang menunjukkan sejauh mana kombinasi variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai R-squared (R2) digunakan untuk menilai seberapa kuat pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen. Menurut (Hair, 2011), terdapat tiga kategori pengelompokan nilai R-squared: kategori kuat (R-squared = 0,75), kategori sedang (R-squared = 0,50) dan kategori lemah (R-squared = 0,25). R-squared tidak hanya digunakan pada regresi, tetapi juga dapat digunakan pada semua model untuk menentukan kualitas model, misalnya dalam model time series, di mana R squared dapat digunakan sebagai indikator tambahan selain MSE untuk memperkuat model yang diperoleh (Ghozali, 2016).

3.6 Uji Signifikasi

3.6.1 Uji Simultan F (F-Test)

Uji F ini merupakan pengujian untuk membandingkan probabilitas F dengan $\alpha = 0,05$. Jika nilai signifikasi $F < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependen, begitupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Sehingga pengambilan keputusan dilihat dari nilai F. Berikut ini ketentuan uji F: H0 ditolak ketika nilai signifikasi $F < 0,05$. Begitu sebaliknya, Ha diterima ketika nilai signifikasi $F > 0,05$. Sehingga:

H0 = Semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

Ha = Semua variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

3.6.2 Uji Parsial T (T-Test)

Menurut (Sudjiono, 2010) bahwa uji t dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa diantara dua buah sampel yang diambil secara acak dari sebuah populasi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan menurut (Ghozali, 2016) uji t merupakan suatu nilai yang digunakan untuk melihat signifikasi pada pengujian hipotesis sehingga dapat dikatakan signifikan apabila nilai t lebih dari 1,96 dan tidak signifikan apabila kurang dari 1,96.

Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikasi yang terdapat di tabel *coefficient.* Pengujian hasil regresi umumnya dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikasi 5% ($\alpha = 0,05$). Menurut (Ghozali, 2016) terdapat dua kriteria uji t: apabila nilai signifikasi uji $t > 0,05$ maka H0 diterima. Dan apabila nilai signifikasi uji $t < 0,05$, maka H0 ditolak. Sehingga:

H0 = tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan dependen

Ha = terdapat pengaruh antara variabel independen dengan dependen

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Data Penelitian

Bab ini akan menjelaskan terkait penelitian tentang analisis determinan ketimpangan regional di Indonesia tahun 2015 – 2022. Menggunakan jenis data sekunder dengan bentuk data *cross section* dan *time series* dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 hingga 2022. Badan pusat Statisik menjadi sumber data dalam penelitian ini. Variabel dependen yang digunakan ialah gini rasio, sedangkan variabel independen yang digunakan yakni indeks pembangunan manusia, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto.

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan produk domestik regional bruto terhadap ketimpangan regional di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2022. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan data panel dengan *fixed effect model* serta Eviews versi 12 sebagai alat untuk menganalisis.

4.1.1 Statistik Deskriptif

Berikut ini adalah tabel data deskriptif yang menjelaskan tentang nilai rata – rata, maksimum, minimum, standar deviasi, dan informasi lainnya dari masing – masing variabel data penelitian dari 34 Provinsi di Indonesia.

Tabel 4.1 Hasil statistik deskriptif

	Mean	Median	Max	Min	Std. dev	Skewnes
Gini	0,353645	0,350750	0,449000	0,245500	0,038917	0,028543
IPM	70,85401	70,80500	82,77000	57,25000	4,219117	-0,06189
Poverty	10,86354	9,035000	28,84700	3,445000	5,676576	1,080244
PDRB	308985,7	132676,7	1953489	20380,30	437738,9	2,244735
TPT	5,069540	4,642500	10,01500	1,140000	1,749089	0,573328

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews12

Data di atas diketahui bahwa nilai rata – rata variabel gini rasio ialah 0,35. Apabila melihat ketimpangan tertinggi sebesar 0,44 menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia memasuki tingkatan sedang. Karena semakin mendekati 1 maka ketimpangan semakin tinggi. Sedangkan nilai variabel gini rasio terendah sebesar 0,24. Sedangkan nilai deviasi standarnya sebesar 0,03

Variabel indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015 hingga 2022 diketahui memiliki nilai rata – rata sebesar 70,85. Nilai maksimum indeks pembangunan manusia di Indonesia sebesar 82,77, namun nilai minimunya tercatat sebesar 57,25. Sedangkan deviasi standarnya sebesar 4,21.

Variabel kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2022 diketahui yang tertinggi sebesar 28,84, sedangkan kemiskinan terendah di Indonesia diketahui sebesar 3,44. Apabila dilihat secara rata – rata sebesar 10,86. Sedangkan nilai deviasi standar yang sebesar 5,67.

Variabel PDRB yang ada di Indonesia tahun 2015 hingga 2022 memiliki nilai maksimum sebesar 1953489 (miliar rupiah), nilai minimumnya 20380,30 (miliar rupiah). Sedangkan dilihat dari nilai rata – ratanya sebesar 308985,7

(miliar rupiah). Sedangkan nilai deviasi standarnya yang sebesar 437738,9 (miliar rupiah).

Variabel tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tahun 2015 hingga 2022 diketahui nilai rata – ratanya sebesar 5,06. Apabila dilihat nilai maksimum dan minimumnya yang sebesar 10,01 dan 1,14. Sedangkan nilai deviasi standarnya sebesar 1,74.

4.2 Pengujian Model Common Effect, Random Effect, dan Fixed Effect

Pengujian data panel menggunakan regresi bertujuan untuk menentukan metode terbaik yang akan digunakan dalam analisis data. Metode terbaik ini dipilih melalui perhitungan menggunakan metode *common effect, random effect, dan fixed effect*. Berikut ini adalah hasil dari estimasi pengujian model *common effect, random effect*, dan *fixed effect* yang akan digunakan untuk membantu mencari model terbaik dalam pengolahan data.

Tabel 4.2 Hasil Pengujian RE, FE, dan CE

Variabel	***Random effect***		***Fixed effect***		***Common effect***	
	Coefficient	**Prob.**	**Coefficient**	**Prob.**	**Coefficient**	**Prob.**
C	0,562494	0,0000	0,534292	0,0000	0,142555	0,0042
IPM	-0,003348	0,0000	-0,002915	0,0000	0,002426	0,0003
Kemiskinan	0,002132	0,0095	0,003254	0,0098	0,003777	0,0000
PDRB	1,58E-08	0,1128	-2,34E-08	0,1241	3,50E-08	0,0000
TPT	5,99E-05	0,9513	-0,000441	0,6823	-0,002500	0,0457
R. squared	0,283422		0,942211		0,304204	
F-stat	26.40107		103,1146		29,18325	
Prob. F-stat	0,000000		0,000000		0,000000	

Sumber: Hasil pengujian menggunakan Eviews12

Berdasarkan hasil regresi untuk keseluruhan model (*common effect, random effect, dan fixed effect*) ditunjukkan bahwa harus dilakukan pengujian terhadap model *random effect, fixed effect,* dan *common effect* untuk mendapatkan model terbaik dengan melakukan uji chow, uji hausman, dan lagrange.

4.3 Pemilihan Model Regresi

4.3.1 Uji Chow

Uji chow merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan atau memilih metode yang terbaik antara *common effect* atau *fixed effect*. Penentuan model uji chow ketika cross section F < 0,05 maka H0 akan ditolak. Sedangkan apabila *cross section* F > 0,05 maka gagal menolak H0. Adapun hipotesis uji chow adalah:

H0 = *Common effect* model terbaik

Ha = *Fixed effect* model terbaik

Tabel 4.3 Hasil uji chow

Effect test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	78,286223	(33,234)	0,0000
Cross-section Chi-square	676,808008	33	0,0000

Sumber: hasil pengolahan Eviews

Berdasarkan hasil uji chow di atas diketahui bahwa nilai dari probabilitas *cross section F* menunjukkan angka 0,0000 < 0,05, sehingga menolak H0 maka model penelitian yang dipilih adalah *fixed effect*. Oleh karena itu dilanjutkan untuk dilakukan pengujian data lagrange.

4.3.2 Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan atau memilih metode yang terbaik antara *random effect* atau *common effect*. Penentuan uji lagrange dapat dilihat dari Breusch-Pagan. Apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan < 0,05 maka menolak H0, apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan > 0,05 akan gagal menolak H0. Adapun hipotesis lagrange multiplier:

H0 = *Common effect* model terbaik

Ha = *Random effect* model terbaik

Tabel 4.4 Hasil lagrange multiplier

	Cross-section	Test hypothesis time	Both
Breusch-Pagan	604,1641 (0,0000)	18,25037 (0,0000)	622,4144 (0,0000)
Honda	24,57975 (0,0000)	4,272045 (0,0000)	20,40130 (0,0000)
King-Wu	24,57975 (0,0000)	4,272045 (0,0000)	14,16272 (0,0000)
Standardiezed Honda	26,54368 (0,0000)	4,957835 (0,0000)	17,994425 (0,0000)
Standardized King-Wu	26,54368 (0,0000)	4,957835 (0,0000)	12,05510 (0,0000)
Gourieroux, et al	--	--	622,4144 (0,0000)

Sumber: hasil pengolahan Eviews12

Berdasarkan hasil pengujian lagrange multipler menunjukkan bahwa nilai *cross section* Breusch-Pagan menunjukkan angka sebesar 0,0000 < 0,05 sehingga menolak H0, maka *random effect* model terbaik. Karena perbedaan antara hasil uji chow dengan lagrange maka dilanjutkan dengan uji hausman.

4.3.3 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih atau membandingkan model terbaik antara *fixed effect* dan *random effect*. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas *cross section* secara acak. Jika probabilitas *cross section random* < 0,05, H0 ditolak. Jika probabilitas *random cross section* > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak. Adapun hipotesisnya sebagai berikut:

H0 = *Random effect* model terbaik

Ha = *Fixed effect* model terbaik

Tabel 4.5 Hasil hausman

Test summary	Chi-sq. statistic	Chi-sq. d.f	Prob.
Cross-section random	31,079900	4	0,0000

Sumber: hasil pengolahan Eviews12

Dari hasil pengujian hausman di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross section random*-nya sebesar 0,0000 < 0,05. Sehingga menolak hipotetsis nol, maka *fixed effect* model merupakan model terbaik.

Kesimpulan dari pemilihan *common effect, random effect,* dan *fixed effect* melalui pengujian chow, lagrange multiple dan hausman bahwa telah didapatkan *fixed effect* merupakan model terbaik untuk interpretasi data panel dalam penelitian ini.

4.4 Estimasi Model *Fixed Effect*

Berdasarkan hasil pengujian chow, lagrange multipler, dan hausman menunjukkan hasil bahwa *fixed effect* adalah model terbaik untuk digunakan dalam penelitian ini untuk melihat estimasi pengaruh indeks pembangunan manusia, kemiskinan, produk domestik bruto, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan di Indonesia. Berikut ini adalah tabel hasil estimasi *fixed effect.*

Tabel 4.6. Hasil estimasi fixed effect

Variabel	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob.
C	0,534292	0,046583	11,46970	0,0000
POVERTY	0,003254	0,001250	2,603581	0,0098
IPM	-0,002915	0,000557	-5,234269	0,0000
TPT	-0,000441	0,001076	-0,409819	0,6823
PDRB	-2,34E-08	1,52E-08	-1,543150	0,1241
R-squared	0,942211			
Adjust R-square	0,933074			
F-Statistic	103,1146			
Prob (F-statistic)	0,000000			

Sumber: hasil pengolahan Eviews12

Berikut ini model regresi berganda dari *fixed effect* model terhadap tingkat ketimpangan regional:

$Gini_{it}$ = 0,534292 + 0,003254 $kemiskinan_{it}$ - 0,002915 IPM_{it} - 0,000441 TPT_{it} - 2,34E-08 $PDRB_{it}$ + e_{it}

4.5 Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi merupakan ukuran atas variabel independen untuk menjelaskan seberapa kuat kepastian model dalam menerapkan variabel dependen. Koefisien determinasi ini memiliki nilai antara nol sampai dengan satu, semakin mendekati nol berarti variabel independen terbatas dalam menjelaskan variabel independen, dan begitu sebaliknya, semakin mendekati satu maka variabel independen semakin dapat menjelaskan variabel dependen.

Estimasi pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka dan produk domestik bruto untuk ketimpangan mempunyai nilai R-squared sebesar 0,942211 atau 94,2211 persen. Nilai R-squared sebesar 94,2211 persen menunjukkan bahwa variasi dalam model mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 94,2211 persen. Sementara itu 5,7789 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4.6 Pengujian Statistik

4.6.1 Uji Signifikasi Simultan (F Test)

F *test* atau uji signifikasi simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.6 diketahui bahwa nilai F statistik sebesar 103,1146 dengan probabilitas 0,000000 yang mana nilai tersebut kurang dari alpha 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kemiskinan, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan PDRB secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan (gini rasio) regional di Indonesia.

4.6.2 Uji parsial T (T-test)

Uji T atau uji parsial merupakan alat penguji untuk mengamati pengaruh variabel independen secara individu terhadap pengaruh variabel. Berikut ini hasil penelitian menggunakan model *fixed effect*:

1. Variabel Kemiskinan

   Dari variabel kemiskinan diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0098. Nilai koefisiennya sebesar 0,003254. Apabila dibandingkan dengan alpha (0,05) maka nilai probabilitas 0,0098 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

2. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

   Dari variabel indeks pembangunan manusia diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai koefisiennya sebesar -0,002915. Apabila dibandingkan dengan alpha (0,05) maka nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

3. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Dari variabel tingkat pengangguran terbuka diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,6823. Sedangkan nilai koefisiennya sebesar -0,000441. Apabila dibandingkan dengan alpha (0,05) maka nilai probabilitas 0,6823 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

4. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

   Dari variabel produk domestik regional bruto diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,1241. Sedangkan nilai koefisiennya sebesar -2,34E-08. Apabila dibandingkan dengan alpha (0,05) maka nilai probabilitas 0,1241 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

4.7 Analisis Ekonomi

4.7.1 Hubungan dari Variabel Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Regional

Hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,003254 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0098, sehingga variabel kemiskinan berpengaruh dan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel ketimpangan terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Hal ini menunjukkan hal yang kurang baik karena apabila terdapat pertambahan prosentase kemiskinan sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan regional di Indonesia sebesar 0,003254 persen dalam rentang tahun 2015 hingga 2022. Kemiskinan memiliki dampak yang kurang baik bagi ketimpangan regional di Indonesia karena dengan adanya kemiskinan membuat kesempatan untuk masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya menjadi terhambat, sehingga kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik menjadi berkurang.

Selain itu, distribusi pendapatan menggambarkan kesenjangan pendapatan atau pemerataan pendapatan di dalam masyarakat, yang mana hal itu menjadi faktor penentu tingkat kemiskinan. Kemiskinan sendiri diukur dari rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan akibat dari penurunan pendapatan tenaga kerja yang secara tidak langsung menyebabkan kelompok penduduk sebelumnya rata-rata pengeluarannya di atas garis kemiskinan, kini berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah perlu menangani kemiskinan ini dengan program yang tepat sasaran seperti sekolah gratis, bantuan langsung tunai, maupun subsidi untuk berbagai usaha kecil menengah. Pada dasarnya program – program tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, namun perlu adanya evaluasi untuk pembagiannya agar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar – benar membutuhkan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safitri, 2021) yang menyatakan bahwa kemiskinan akan menyebabkan ketimpangan di suatu wilayah. Di dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan berdampak meningkatkan kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan yang akan menurunkan kemiskinan serta ketimpangan. Dalam penelitian (Hindun, 2019) juga menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan. Dalam penelitian tersebut dinyatakan juga bahwa peningkatan pendapatan akan menurunkan celah perbedaan pendapatan yang diperoleh sehingga bisa menurunkan ketimpangan.

4.7.2 Hubungan dari Variabel Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Regional

Hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel indeks pembangunan manusia sebesar -0,002915 dengan probabilitas 0,0000 sehingga variabel indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Ini berarti bahwa apabila terjadi kenaikan indeks pembangunan manusia sebesar 1 persen, maka akan menurunkan prosentase ketimpangan regional yang terjadi di Indonesia sebesar

0,002915 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Sebagai ilustrasi, daerah dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh indeks pembangunan manusia yang tinggi, akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan regional.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Istiqomah, 2018) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Indeks pembangunan manusia sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan manusia dapat berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan sehingga menimbulkan keamanan dan kesejahteraan antar warganya. Pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan, mengarah pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurut (Yoertiara & Feriyanto, 2022) indeks pembangunan manusia memiliki indikator fundamental seperti kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak. Apabila seseorang dapat mengakses pendidikan tinggi, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat, sehingga produktivitas kerjanya akan lebih tinggi dan pada akhirnya memperoleh pendapatan yang lebih besar.

4.7.3 Hubungan dari Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil estimasi di atas, diketahui bahwa nilai koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar -0,000441, sedangkan nilai probabilitas sebesar 0,6823 sehingga variabel tingkat pengangguran terbuka

tidak berpengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Artinya apabila terjadi kenaikan variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 1 persen, maka akan menurunkan prosentase ketimpangan sebesar 0,6823 persen. Namun hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan regional. Ketidaksesuaian ini diakibatkan oleh intervensi pemerintah melalui program bantuan langsung tunai dan pelatihan kerja. Menurut World Bank (2020) program – program semacam ini terbukti efektif dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas dan efektivitas program – program tersebut. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan yang ketat agar bantuan tepat sasaran, serta perluasan wilayah penyelenggaraan program.

Intervensi dari pemerintah dalam menangani pengangguran menunjukkan penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka nasional berkisar 6%, terjadi kenaikan menjadi 6,37% pada tahun 2021, dan menunjukkan penurunan pada tahun 2022 di angka 5,84%. Sedangkan angka ketimpangan dalam tiga tahun tersebut stabil diantara 0,38%.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Farhan, 2022) yang menyatakan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti bantuan sosial yang berbentuk berbagai program dapat meringankan beban masyarakat karena kebutuhannya dapat terpenuhi, meskipun bantuan tersebut belum merata di wilayah Pulau Jawa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hariani, 2019) juga menyaatakan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur pada tahun 2012-2015. Tingkat pengangguran yang tinggi pada kabupaten/kota di

Jawa Timur menghasilkan masih adanya faktor produksi yang masih belum diserap secara optimal dalam menunjang pembangunan di setiap wilayah

4.7.4 Hubungan dari Variabel Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Ketimpangan Regional

Berdasarkan hasil estimasi di atas diketahui bahwa nilai probabilitas variabel produk domestik regional bruto sebesar 0,1241, sedangkan nilai koefisiennya sebesar -2,34E-08. Maka variabel produk domestik regional bruto tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Artinya apabila terjadi kenaikan produk domestik regional bruto sebesar 1 miliar (rupiah), maka akan terjadi penurunan prosentase ketimpangan sebesar 2,34 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa produk domestik regional bruto memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai produk domestik regional bruto, maka semakin rendah tingkat ketimpangan regional. Dan sebaliknya. Tingginya nilai produk domestik regional bruto mencerminkan keberhasilan suatu daerah atau daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan tersedia sehingga mengurangi ketimpangan regional. Namun kenaikan PDRB tidak dapat menjelaskan secara gamblang terkait distribusi pendapatan di masyarakat karena bisa saja kenaikan pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir orang saja.

Apabila dilihat dari data yang telah dihimpun, dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2022, PDRB mengalami kenaikan mulai dari Rp 451583,472 miliar pada tahun 2015, menjadi Rp 589951,8642 miliar pada tahun 2022. Apabila dilihat ketimpangannya dari tahun 2015 hingga 2022 terus mengalami penurunan. Ketimpangan pada tahun 2015 menunjukkan angka 0,4% dan turus turun hingga tahun 2022 dengan angka 0,38%.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Putri, 2023) yang menyatakan bahwa nilai PDRB terbukti tidak berpengaruh terhadap dalam menurunkan ketimpangan ini bisa terjadi karena pertumbuhan ekonomi di Provinsi-provinsi Pulau Jawa tidak berkembang dengan cukup baik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi hanya bersifat berpusat pada beberapa daerah saja. Penelitian yang dilakukan oleh (Anis, 2022) juga menyebutkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2022.

Hubungan antar variabel secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia.
2. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia.
3. Variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia.
4. Variabel produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap ketimpangan regional di Indonesia.

5.2 Implikasi

Dari kesimpulan yang telah dibuat, berikut ini adalah implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh positf dan signifikan terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Karena dengan semakin tingginya angka kemiskinan, maka ketimpangan regional akan semakin tinggi juga. Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan serta mengawasi program Program Keluarga Harapan, subsidi BBM, dan bantuan sosial agar dapat diterima oleh warga yang benar – benar membutuhkan sehingga dapat menekan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan regional di Indonesia.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan regional di Indonesia. Menjadi sebuah catatan penting bagi pemerintah akan pemerataan bagi pulau – pulau selain Jawa, karena indeks pembangunan manusia merupakan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sehingga perlu adanya program nasional berkelanjutan yang berupaya dalam peningkatan kualitas akses pendidikan, sarana pendidikan, infrastruktur, maupun pendidikan yang murah bagi masyarakat di seluruh penjuru negara agar dampak dari pembangunan pendidikan bisa dirasakan oleh semua warga negara di seluruh wilayah. Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar untuk menciptakan masyarakat yang memiliki daya saing, sehingga menciptakan kesetaraan pemerataan bagi daerah terpencil dan terpinggir di Indonesia guna mengurangi ketimpangan regional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2024. Gini Ratio.

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html

Badan Pusat Statistik. 2024. Indeks Pembangunan Manusia

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/V25GaFNHaExaMnhITm1sWmRrUlJZelJzYUc1SGR6MDkjMw==/indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html?year=2013

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2024. Kemiskinan.

https://jatim.bps.go.id/indicator/23/344/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi-.html

Badan Pusat Statistik. 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka.

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQzIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--agustus-2023.html

Badan Pusat Statistik. 2024. Produk Domestik Regional Bruto.

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YjJ0WGNERmxhMUV5UkdoeFIwSXJjRUo0ZERGalVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022.html?year=2015

Bank, W. (2020). *Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery.*

Diana Wijayanti, I. D. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Di Pulau Jawa Tahun 2017-2022. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2*, 126-134.

DIY, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pendapatan. *Bappeda DIY* (pp. 107-109). Yogyakarta: Bappeda.

Feriyanto, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan*, 92-100.

Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gregory, M. &. (2000). *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua.* Jakarta: Erlangga.

Hair, J. F. (2011). *Multivariate Data Analysis Fifth Edition.*

Harahap, S. S. (2006). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hariani, E. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal of Applied Business Tijab*.

Hasanah, K. R. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan volume 2*, 12-21.

Hikmah Nurain, I. A. (2022). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA LIMA PROVINSI TERTIMPANG DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, Volume 18*, 53-65.

Ismail, P. &. (2012). *Teori Ekonomi.* Surabaya: Dharma Ilmu.

Istiqomah, R. (2018). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, IPM DAN INVESTASI (PMA) TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR PROVINSI (Studi Kasus Di Pulau Jawa Tahun 2011-2016). *Junal Ilmiah, 10*, 1-8.

Julia Delmana Sari, N. A. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Akses Listrik Di Indonesia. *Equilibrium, Volume 11*, 35-49.

Juliana, R. &. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumpal Penduduk, PAD, IPM, dan UMK Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 293-300.

Khandker, H. &. (2009). *Handbook On Poverty And Inquality.* World Bank.

M.P, T. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.* Jakarta: Airlangga.

Muhammad Farhan, S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA. *Sibatik journal*, 243-258.

Muhammad Refkhi Al Aqilah, M. M. (2024). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera. *Journal of Law, Administration, and Social Science, Volume 4* , 13-24.

Natasya Arifa Salsabila, R. P. (2023). Pengaruh Investasi,Indeks Pembangunan Manusia,dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 437-445.

P, T. M. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.* Jakarta: Erlangga.

Piketty, T. (2014). Capital In The Twenty First Century. *Havard University Press*.

Putri, I. D. (2023). Analisis Determinan Ketimpangan.

Riandi, V. (2020). Pengaruh Kemiskinan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera Indonesia. *Universitas Syah Kuala*, 57-68.

Sahal, A. (2023). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *Dspaceuii*, 1-46.

Sari, R. N. (2021). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, dan Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Yogyakarta Periode 2014-2019. *Naskah Publikasi*, 1-12.

Simanjuntak, P. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Jakarta: LPFEUI.

Sjahrir. (1986). *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi.* Jakarta: LP3ES.

Subri, M. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT Grafindo.

Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Makroekonomi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno, S. (2004). *Mikroekonomi: Ekonomi Pengantar Edisi 3.* Jakarta: Rajawali Press.

Sukirno, S. (2007). *Makro Ekonomi Modern.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tambunan. (2001). *Transformasi Ekonomi Indonesia (Teori dan Penemuan Empiris).* Jakarta: Salemba empat.

Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Incom Trap. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI*, 112-132.

Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya.* Jakarta.

Zainal, S. &. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Sepatu Olah Raga dan Sepatu Kulit Indonesia Tahun 2000-2006. *Makalah paralel*.

Lampiran 1

Provinsi	Tahun	GINI RATIO	POVERTY	IPM	TPT	PDRB
ACEH	2015	0,3365	17,095	69,45	8,83	112665,53
SUMATERA UTARA	2015	0,331	10,66	69,51	6,55	440955,85
SUMATERA BARAT	2015	0,3305	7,01	69,98	6,44	140719,47
RIAU	2015	0,365	8,62	70,84	7,275	448991,96
JAMBI	2015	0,3525	8,99	68,89	3,535	125037,4
SUMATERA SELATAN	2015	0,347	14,01	67,46	5,55	254044,88
BENGKULU	2015	0,3735	17,52	68,59	4,06	38066,01
LAMPUNG	2015	0,364	13,94	66,95	4,29	199536,92
KEP. BANGKA BELITUNG	2015	0,279	5,115	69,05	4,82	45962,3
KEP. RIAU	2015	0,3515	6,01	73,75	7,625	155131,35
DKI JAKARTA	2015	0,426	3,77	78,99	7,795	1454563,85
JAWA BARAT	2015	0,4205	9,55	69,5	8,56	1207232,34
JAWA TENGAH	2015	0,382	13,45	69,49	5,15	806765,09
DI YOGYAKARTA	2015	0,4265	14,035	77,59	4,07	83474,45
JAWA TIMUR	2015	0,409	12,31	68,95	4,39	1331376,1
BANTEN	2015	0,3935	5,825	70,27	9,065	368377,2
BALI	2015	0,388	4,995	73,27	1,68	129126,56
NUSA TENGGARA BARAT	2015	0,364	16,82	65,19	5,335	89337,99
NUSA TENGGARA TIMUR	2015	0,3435	22,595	62,67	3,475	56770,79
KALIMANTAN BARAT	2015	0,332	8,235	65,59	4,965	112346,76
KALIMANTAN TENGAH	2015	0,313	5,925	68,53	3,84	78890,97
KALIMANTAN SELATAN	2015	0,3435	4,855	68,38	4,875	110863,12
KALIMANTAN TIMUR	2015	0,3155	6,165	74,17	7,335	440676,36
KALIMANTAN UTARA	2015	0,304	6,28	68,76	5,735	49315,75

SULAWESI UTARA	2015	0,367	8,815	70,39	8,86	70425,33
SULAWESI TENGAH	2015	0,372	14,365	66,76	3,545	82787,2
SULAWESI SELATAN	2015	0,414	9,755	69,15	5,88	250802,99
SULAWESI TENGGARA	2015	0,39	13,32	68,75	4,585	72993,33
GORONTALO	2015	0,4105	18,24	65,86	3,855	22068,8
SULAWESI BARAT	2015	0,3625	12,15	62,96	2,58	25964,43
MALUKU	2015	0,339	19,435	67,05	8,325	24859,2
MALUKU UTARA	2015	0,283	6,53	65,91	5,805	20380,3
PAPUA BARAT	2015	0,434	25,775	61,73	6,345	52346,49
PAPUA	2015	0,4065	28,285	57,25	3,855	130311,61
ACEH	2016	0,337	16,58	70	7,85	116374,3
SUMATERA UTARA	2016	0,3155	10,31	70	6,165	463775,46
SUMATERA BARAT	2016	0,3215	7,115	70,73	5,45	148134,24
RIAU	2016	0,347	7,825	71,2	6,685	458769,34
JAMBI	2016	0,3475	8,39	69,62	4,33	130501,13
SUMATERA SELATAN	2016	0,355	13,465	68,24	4,125	266857,4
BENGKULU	2016	0,3555	17,175	69,33	3,57	40076,54
LAMPUNG	2016	0,361	14,075	67,65	4,58	209793,73
KEP. BANGKA BELITUNG	2016	0,2815	5,13	69,55	4,385	47848,37
KEP. RIAU	2016	0,353	5,91	73,99	8,36	162853,04
DKI JAKARTA	2016	0,404	3,75	79,6	5,945	1539916,88
JAWA BARAT	2016	0,4075	8,86	70,05	8,73	1275619,24
JAWA TENGAH	2016	0,3615	13,23	69,98	4,415	849099,35
DI YOGYAKARTA	2016	0,4225	13,22	78,38	2,765	87685,81
JAWA TIMUR	2016	0,402	11,95	69,74	4,175	1405563,51
BANTEN	2016	0,393	5,39	70,96	8,435	387835,09
BALI	2016	0,37	4,2	73,65	2,005	137296,45
NUSA TENGGARA BARAT	2016	0,362	16,25	65,81	3,8	94524,29
NUSA TENGGARA TIMUR	2016	0,349	22,1	63,13	3,42	59678,01

KALIMANTAN BARAT	2016	0,336	7,935	65,88	4,405	118183,27
KALIMANTAN TENGAH	2016	0,3385	5,51	69,13	4,245	83900,24
KALIMANTAN SELATAN	2016	0,3415	4,685	69,05	4,54	115743,57
KALIMANTAN TIMUR	2016	0,3215	6,055	74,59	8,405	439003,83
KALIMANTAN UTARA	2016	0,3025	6,61	69,2	4,575	51064,74
SULAWESI UTARA	2016	0,3825	8,27	71,05	7	74764,66
SULAWESI TENGAH	2016	0,3545	14,27	67,47	3,375	91014,56
SULAWESI SELATAN	2016	0,413	9,32	69,76	4,955	269401,31
SULAWESI TENGGARA	2016	0,395	12,825	69,31	3,25	77745,51
GORONTALO	2016	0,4145	17,675	66,29	3,32	23507,21
SULAWESI BARAT	2016	0,3675	11,465	63,6	3,025	27524,77
MALUKU	2016	0,346	19,22	67,6	7,015	26284,23
MALUKU UTARA	2016	0,2975	6,37	66,63	3,72	21556,68
PAPUA BARAT	2016	0,387	25,155	62,21	6,595	54711,28
PAPUA	2016	0,3945	28,847	58,05	3,16	142224,93
ACEH	2017	0,329	16,405	70,6	6,98	121240,98
SUMATERA UTARA	2017	0,325	9,75	70,57	6,005	487531,23
SUMATERA BARAT	2017	0,315	6,81	71,24	5,69	155984,36
RIAU	2017	0,325	7,595	71,79	5,69	470983,51
JAMBI	2017	0,3345	8,045	69,99	3,77	136501,71
SUMATERA SELATAN	2017	0,363	13,145	68,86	4,095	281571,01
BENGKULU	2017	0,35	16,02	69,95	3,275	42073,52
LAMPUNG	2017	0,3335	13,365	68,25	4,38	220626,1
KEP. BANGKA BELITUNG	2017	0,279	5,25	69,99	4,12	49985,15
KEP. RIAU	2017	0,3465	6,095	74,45	6,8	166081,68
DKI JAKARTA	2017	0,411	3,775	80,06	6,25	1635359,15
JAWA BARAT	2017	0,398	8,27	70,69	8,355	1343662,14

JAWA TENGAH	2017	0,365	12,62	70,52	4,36	893750,3
DI YOGYAKARTA	2017	0,436	12,69	78,89	2,93	92300,24
JAWA TIMUR	2017	0,4055	11,485	70,27	4,05	1482299,58
BANTEN	2017	0,3805	5,52	71,42	8,515	410137
BALI	2017	0,3815	4,195	74,3	1,38	144933,31
NUSA TENGGARA BARAT	2017	0,3745	15,56	66,58	3,59	94608,21
NUSA TENGGARA TIMUR	2017	0,359	21,615	63,73	3,24	62725,41
KALIMANTAN BARAT	2017	0,328	7,87	66,26	4,29	124289,17
KALIMANTAN TENGAH	2017	0,335	5,315	69,79	3,68	89544,9
KALIMANTAN SELATAN	2017	0,347	4,715	69,65	4,15	121858,52
KALIMANTAN TIMUR	2017	0,3315	6,135	75,12	7,73	452741,91
KALIMANTAN UTARA	2017	0,3105	7,09	69,84	5,355	54537,31
SULAWESI UTARA	2017	0,395	8	71,66	6,65	79484,03
SULAWESI TENGAH	2017	0,35	14,18	68,11	3,39	97474,86
SULAWESI SELATAN	2017	0,418	9,43	70,34	5,19	288814,17
SULAWESI TENGGARA	2017	0,399	12,39	69,86	3,22	83001,69
GORONTALO	2017	0,4175	17,395	67,01	3,965	25090,13
SULAWESI BARAT	2017	0,3465	11,24	64,3	3,095	29282,49
MALUKU	2017	0,332	18,37	68,19	8,53	27814,05
MALUKU UTARA	2017	0,3235	6,395	67,2	5,075	23210,86
PAPUA BARAT	2017	0,3885	24,11	62,99	7,005	56907,96
PAPUA	2017	0,3975	27,69	59,09	3,79	148818,29
ACEH	2018	0,3215	15,825	71,19	6,44	126824,37
SUMATERA UTARA	2018	0,3145	9,08	71,18	5,58	512762,63
SUMATERA BARAT	2018	0,313	6,6	71,73	5,67	163996,19
RIAU	2018	0,337	7,3	72,44	5,765	482064,63
JAMBI	2018	0,3345	7,885	70,65	3,645	142902

SUMATERA SELATAN	2018	0,3495	12,81	69,39	4,175	298484,07
BENGKULU	2018	0,3585	15,42	70,64	2,99	44164,11
LAMPUNG	2018	0,336	13,075	69,02	4,18	232165,99
KEP. BANGKA BELITUNG	2018	0,2765	5,01	70,67	3,6	52208,04
KEP. RIAU	2018	0,3345	6,015	74,84	7,67	173498,75
DKI JAKARTA	2018	0,392	3,56	80,47	6,19	1735208,29
JAWA BARAT	2018	0,406	7,35	71,3	8,225	1419624,14
JAWA TENGAH	2018	0,3675	11,255	71,12	4,33	941091,14
DI YOGYAKARTA	2018	0,4315	11,97	79,53	3,185	98024,01
JAWA TIMUR	2018	0,375	10,915	70,77	3,84	1563441,82
BANTEN	2018	0,376	5,245	71,95	8,095	433782,71
BALI	2018	0,3705	3,96	74,77	1,14	154072,66
NUSA TENGGARA BARAT	2018	0,3815	14,69	67,3	3,43	90349,13
NUSA TENGGARA TIMUR	2018	0,355	21,19	64,39	2,835	65929,19
KALIMANTAN BARAT	2018	0,332	7,57	66,98	4,135	130596,32
KALIMANTAN TENGAH	2018	0,343	5,135	70,42	3,525	94566,25
KALIMANTAN SELATAN	2018	0,342	4,595	70,17	4,035	128052,58
KALIMANTAN TIMUR	2018	0,342	6,045	75,83	6,6	464694,43
KALIMANTAN UTARA	2018	0,3035	6,975	70,56	4,905	57459,31
SULAWESI UTARA	2018	0,383	7,695	72,2	6,235	84249,72
SULAWESI TENGAH	2018	0,3315	13,85	68,88	3,245	117555,83
SULAWESI SELATAN	2018	0,3925	8,965	70,9	4,99	309156,19
SULAWESI TENGGARA	2018	0,4005	11,475	70,61	2,98	88310,05
GORONTALO	2018	0,41	16,32	67,71	3,54	26719,27
SULAWESI BARAT	2018	0,368	11,235	65,1	2,67	31114,14
MALUKU	2018	0,3345	17,985	68,87	7,01	29457,13
MALUKU UTARA	2018	0,332	6,63	67,76	4,595	25034,08

PAPUA BARAT	2018	0,3925	22,835	63,74	6,36	60465,52
PAPUA	2018	0,391	27,585	60,06	2,875	159711,85
ACEH	2019	0,32	15,165	71,9	5,825	132069,62
SUMATERA UTARA	2019	0,316	8,73	71,74	5,48	539513,85
SUMATERA BARAT	2019	0,3065	6,355	72,39	5,38	172205,57
RIAU	2019	0,3325	6,99	73	5,56	495607,05
JAMBI	2019	0,3225	7,555	71,26	3,79	149111,09
SUMATERA SELATAN	2019	0,335	12,635	70,02	4,275	315464,75
BENGKULU	2019	0,3345	15,07	71,21	2,835	46345,45
LAMPUNG	2019	0,33	12,46	69,57	3,99	244378,31
KEP. BANGKA BELITUNG	2019	0,2655	4,56	71,3	3,45	53941,9
KEP. RIAU	2019	0,339	5,85	75,48	7,26	181877,67
DKI JAKARTA	2019	0,3925	3,445	80,76	6,02	1836240,55
JAWA BARAT	2019	0,4	6,865	72,03	7,91	1490959,69
JAWA TENGAH	2019	0,3595	10,69	71,73	4,315	991516,54
DI YOGYAKARTA	2019	0,4255	11,57	79,99	3,035	104485,46
JAWA TIMUR	2019	0,367	10,285	71,5	3,795	1649895,64
BANTEN	2019	0,363	5,015	72,44	7,83	456620,03
BALI	2019	0,368	3,7	75,38	1,395	162693,36
NUSA TENGGARA BARAT	2019	0,3765	14,22	68,14	3,215	93872,44
NUSA TENGGARA TIMUR	2019	0,3555	20,855	65,23	3,06	69389,02
KALIMANTAN BARAT	2019	0,3225	7,385	67,65	4,205	137243,09
KALIMANTAN TENGAH	2019	0,3355	4,895	70,91	3,625	100349,29
KALIMANTAN SELATAN	2019	0,334	4,51	70,72	3,795	133283,85
KALIMANTAN TIMUR	2019	0,3325	5,925	76,61	6,295	486523,18
KALIMANTAN UTARA	2019	0,2935	6,56	71,15	5,165	61417,79
SULAWESI UTARA	2019	0,3715	7,585	72,99	5,59	89009,26

SULAWESI TENGAH	2019	0,3285	13,33	69,5	3,285	127935,06
SULAWESI SELATAN	2019	0,39	8,625	71,66	4,86	330506,38
SULAWESI TENGGARA	2019	0,396	11,14	71,2	3,2	94053,52
GORONTALO	2019	0,4085	15,415	68,49	3,505	28429,97
SULAWESI BARAT	2019	0,365	10,985	65,73	2,135	32843,81
MALUKU	2019	0,322	17,67	69,45	6,65	31049,45
MALUKU UTARA	2019	0,311	6,84	68,7	4,885	26597,55
PAPUA BARAT	2019	0,3835	21,84	64,7	6,12	62074,52
PAPUA	2019	0,3925	27,04	60,84	3,365	134565,89
ACEH	2020	0,321	15,21	73,29	5,995	131580,97
SUMATERA UTARA	2020	0,315	8,945	73,62	5,81	533746,36
SUMATERA BARAT	2020	0,303	6,42	74,29	6,065	169426,61
RIAU	2020	0,325	6,93	73,67	5,62	489995,75
JAMBI	2020	0,318	7,775	72,29	4,695	148354,25
SUMATERA SELATAN	2020	0,3385	12,82	71,62	4,705	315129,22
BENGKULU	2020	0,3285	15,165	72,93	3,575	46338,43
LAMPUNG	2020	0,3235	12,55	71,04	4,465	240319,59
KEP. BANGKA BELITUNG	2020	0,2595	4,71	72,74	4,3	52705,94
KEP. RIAU	2020	0,3365	6,025	77,69	8,16	174959,21
DKI JAKARTA	2020	0,3995	4,61	81,92	8,05	1792291,09
JAWA BARAT	2020	0,4005	8,155	72,61	9,085	1453380,72
JAWA TENGAH	2020	0,3605	11,625	71,88	5,34	965227,27
DI YOGYAKARTA	2020	0,4355	12,54	79,95	3,975	101698,52
JAWA TIMUR	2020	0,365	11,275	73,04	4,72	1611392,55
BANTEN	2020	0,364	6,275	74,41	9,315	441148,58
BALI	2020	0,369	4,115	76,52	3,44	147498,94
NUSA TENGGARA BARAT	2020	0,381	14,1	70,46	3,63	93288,87
NUSA TENGGARA TIMUR	2020	0,355	21,055	66,93	3,46	68809,61
KALIMANTAN BARAT	2020	0,321	7,205	68,76	5,14	134743,38

KALIMANTAN TENGAH	2020	0,3245	5,04	72,62	3,955	98933,61
KALIMANTAN SELATAN	2020	0,3415	4,605	73,09	4,205	130864,32
KALIMANTAN TIMUR	2020	0,3315	6,37	75,94	6,795	472393,33
KALIMANTAN UTARA	2020	0,296	7,105	71	5,34	60746,21
SULAWESI UTARA	2020	0,369	7,7	73,67	6,355	88126,37
SULAWESI TENGAH	2020	0,3235	12,99	70,31	3,35	134152,69
SULAWESI SELATAN	2020	0,3855	8,855	73,08	6,005	328154,57
SULAWESI TENGGARA	2020	0,3885	11,345	71,61	3,84	93445,72
GORONTALO	2020	0,407	15,405	69,51	3,785	28425,38
SULAWESI BARAT	2020	0,36	11,185	68,4	2,855	32074,02
MALUKU	2020	0,322	17,715	71,34	7,14	30765,89
MALUKU UTARA	2020	0,299	6,875	69,3	4,62	28031,44
PAPUA BARAT	2020	0,379	21,535	65,94	6,79	61604,13
PAPUA	2020	0,3935	26,72	61,22	3,85	137787,29
ACEH	2021	0,3235	15,43	73,48	6,3	135274,04
SUMATERA UTARA	2021	0,3135	8,75	73,84	6,17	547651,82
SUMATERA BARAT	2021	0,303	6,335	74,56	6,595	174999,89
RIAU	2021	0,3265	7,06	73,89	4,69	506471,91
JAMBI	2021	0,318	7,88	72,62	4,925	153850,63
SUMATERA SELATAN	2021	0,3405	12,815	71,83	5,075	326405,18
BENGKULU	2021	0,3235	14,825	73,16	3,685	47853,78
LAMPUNG	2021	0,3185	12,145	71,25	4,615	246966,49
KEP. BANGKA BELITUNG	2021	0,2515	4,785	72,96	5,035	55369,65
KEP. RIAU	2021	0,341	5,935	77,87	10,015	180952,44
DKI JAKARTA	2021	0,41	4,695	82,25	8,505	1856000,7
JAWA BARAT	2021	0,409	8,185	72,96	9,37	1507746,39
JAWA TENGAH	2021	0,37	11,52	72,17	5,955	997321,13
DI YOGYAKARTA	2021	0,4385	12,355	80,22	4,42	107372,56

JAWA TIMUR	2021	0,369	10,995	73,48	5,455	1668754,36
BANTEN	2021	0,364	6,58	74,68	8,995	460952,79
BALI	2021	0,3765	4,625	76,69	5,395	143871,68
NUSA TENGGARA BARAT	2021	0,3825	13,985	70,86	3,49	95437,86
NUSA TENGGARA TIMUR	2021	0,3425	20,715	67,02	3,575	70540,56
KALIMANTAN BARAT	2021	0,314	6,995	68,99	5,775	141212,04
KALIMANTAN TENGAH	2021	0,3215	5,16	72,81	4,39	102481,47
KALIMANTAN SELATAN	2021	0,3275	4,695	73,45	4,64	135424,59
KALIMANTAN TIMUR	2021	0,3325	6,405	76,6	6,82	484439,61
KALIMANTAN UTARA	2021	0,2885	7,095	71,57	4,625	63168,43
SULAWESI UTARA	2021	0,362	7,565	74,03	7,17	91790,69
SULAWESI TENGAH	2021	0,321	12,59	70,54	3,74	149815,86
SULAWESI SELATAN	2021	0,3795	8,655	73,38	5,755	343395,41
SULAWESI TENGGARA	2021	0,392	11,7	71,82	4,07	97275,32
GORONTALO	2021	0,4085	15,51	69,82	3,21	29107,91
SULAWESI BARAT	2021	0,361	11,57	68,64	3,205	32898,3
MALUKU	2021	0,315	17,085	71,55	6,83	31881,23
MALUKU UTARA	2021	0,289	6,635	69,56	4,885	32738,67
PAPUA BARAT	2021	0,377	21,83	66,11	6,01	61289,4
PAPUA	2021	0,3965	27,12	61,4	3,55	158675,15
ACEH	2022	0,301	14,695	74,11	6,07	140971,72
SUMATERA UTARA	2022	0,319	8,375	74,51	5,815	573528,77
SUMATERA BARAT	2022	0,296	5,98	75,16	6,225	182629,14
RIAU	2022	0,3245	6,81	74,45	4,385	529532,98
JAMBI	2022	0,3275	7,66	73,11	4,645	161730,02
SUMATERA SELATAN	2022	0,3345	11,925	72,48	4,685	343459,88
BENGKULU	2022	0,315	14,48	73,68	3,49	49916,06

LAMPUNG	2022	0,3135	11,505	71,79	4,415	257534,19
KEP. BANGKA BELITUNG	2022	0,2455	4,53	73,5	4,475	57805,15
KEP. RIAU	2022	0,3335	6,135	78,48	8,125	190163,7
DKI JAKARTA	2022	0,4175	4,65	82,77	7,59	1953488,99
JAWA BARAT	2022	0,4145	8,02	73,63	8,33	1589984,93
JAWA TENGAH	2022	0,37	10,955	72,8	5,66	1050278,09
DI YOGYAKARTA	2022	0,449	11,415	80,65	3,895	112901,32
JAWA TIMUR	2022	0,368	10,435	74,05	5,15	1757874,93
BANTEN	2022	0,37	6,2	75,25	8,31	484131,22
BALI	2022	0,3625	4,55	77,4	4,82	150830,41
NUSA TENGGARA BARAT	2022	0,3735	13,75	71,65	3,405	102073,66
NUSA TENGGARA TIMUR	2022	0,337	20,715	67,63	3,42	72695,28
KALIMANTAN BARAT	2022	0,3125	6,77	69,71	4,985	148368,94
KALIMANTAN TENGAH	2022	0,314	5,25	73,17	4,23	109094,72
KALIMANTAN SELATAN	2022	0,313	4,55	74	4,47	142341,22
KALIMANTAN TIMUR	2022	0,322	6,375	77,36	6,24	506158,91
KALIMANTAN UTARA	2022	0,271	6,815	72,21	4,475	66528,39
SULAWESI UTARA	2022	0,362	7,31	74,52	6,56	96768,15
SULAWESI TENGAH	2022	0,3065	12,315	71,01	3,335	172624,82
SULAWESI SELATAN	2022	0,371	8,645	73,96	5,13	360895,02
SULAWESI TENGGARA	2022	0,3765	11,2	72,38	3,61	102656,43
GORONTALO	2022	0,4205	15,465	70,62	2,915	30284,29
SULAWESI BARAT	2022	0,3665	11,835	69,19	2,725	33658,22
MALUKU	2022	0,3035	16,1	72,04	6,66	33574,66
MALUKU UTARA	2022	0,294	6,3	70,26	4,48	40248,38
PAPUA BARAT	2022	0,377	21,38	66,72	5,575	62518,53
PAPUA	2022	0,3995	26,68	62,16	3,215	172907,29

Lampiran 2

Common effect model

Dependent Variable: GINI RATIO
Method: Panel Least Squares
Date: 06/03/24 Time: 19:55
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 272

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.142555	0.049306	2.891205	0.0042
IPM	0.002426	0.000660	3.674767	0.0003
KEMISKINAN	0.003777	0.000463	8.163031	0.0000
PDRB	3.50E-08	5.13E-09	6.821920	0.0000
PENGANGGURAN	-0.002500	0.001245	-2.007845	0.0457

R-squared	0.304204	Mean dependent var	0.353645
Adjusted R-squared	0.293780	S.D. dependent var	0.038917
S.E. of regression	0.032705	Akaike info criterion	-3.984367
Sum squared resid	0.285588	Schwarz criterion	-3.918084
Log likelihood	546.8739	Hannan-Quinn criter.	-3.957757
F-statistic	29.18325	Durbin-Watson stat	0.105316
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 3

Random effect model

Dependent Variable: GINI_RATIO
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/03/24 Time: 20:00
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 272
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.562494	0.038591	14.57581	0.0000
IPM	-0.003348	0.000476	-7.035428	0.0000
KEMISKINAN	0.002132	0.000817	2.611031	0.0095
PDRB	1.58E-08	9.94E-09	1.590973	0.1128
PENGANGGURAN	5.99E-05	0.000980	0.061170	0.9513

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.031119	0.9052
Idiosyncratic random	0.010068	0.0948

Weighted Statistics

R-squared	0.283422	Mean dependent var	0.040190
Adjusted R-squared	0.272687	S.D. dependent var	0.012390
S.E. of regression	0.010566	Sum squared resid	0.029809
F-statistic	26.40107	Durbin-Watson stat	0.827888
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.038478	Mean dependent var	0.353645
Sum squared resid	0.426240	Durbin-Watson stat	0.057898

Lampiran 4

Fixed effect model

Dependent Variable: GINI_RATIO
Method: Panel Least Squares
Date: 05/28/24 Time: 21:14
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 272

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.534292	0.046583	11.46970	0.0000
IPM	-0.002915	0.000557	-5.234269	0.0000
KEMISKINAN	0.003254	0.001250	2.603581	0.0098
PDRB	-2.34E-08	1.52E-08	-1.543150	0.1241
PENGANGGURAN	-0.000441	0.001076	-0.409819	0.6823

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.942211	Mean dependent var	0.353645
Adjusted R-squared	0.933074	S.D. dependent var	0.038917
S.E. of regression	0.010068	Akaike info criterion	-6.229985
Sum squared resid	0.023719	Schwarz criterion	-5.726233
Log likelihood	885.2779	Hannan-Quinn criter.	-6.027746
F-statistic	103.1146	Durbin-Watson stat	1.021646
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5

Statistik deskriptif

	Gini rasio	IPM	Kemiskinan	PDRB	Pengangguran
Mean	0.353645	70.85401	10.86354	308985.7	5.069540
Median	0.350750	70.80500	9.035000	132676.7	4.642500
Maximum	0.449000	82.77000	28.84700	1953489.	10.01500
Minimum	0.245500	57.25000	3.445000	20380.30	1.140000
Std. Dev.	0.038917	4.219117	5.676576	437738.9	1.749089
Skewness	0.028543	-0.061890	1.080244	2.244735	0.573328
Kurtosis	2.576552	3.948931	3.755759	7.054705	2.718403
Jarque-Bera	2.069097	10.37897	59.37402	414.7544	15.80000
Probability	0.355387	0.005575	0.000000	0.000000	0.000371
Sum	96.19150	19272.29	2954.882	84044121	1378.915
Sum Sq. Dev.	0.410447	4824.058	8732.571	5.19E+13	829.0740

Lampiran 6

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	78.286223	(33,234)	0.0000
Cross-section Chi-square	676.808008	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: GINI_RATIO
Method: Panel Least Squares
Date: 05/28/24 Time: 20:48
Sample: 2015 2022
Periods included: 8
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 272

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.142555	0.049306	2.891205	0.0042
IPM	0.002426	0.000660	3.674767	0.0003
KEMISKINAN	0.003777	0.000463	8.163031	0.0000
PDRB	3.50E-08	5.13E-09	6.821920	0.0000
PENGANGGURAN	-0.002500	0.001245	-2.007845	0.0457

R-squared	0.304204	Mean dependent var	0.353645
Adjusted R-squared	0.293780	S.D. dependent var	0.038917
S.E. of regression	0.032705	Akaike info criterion	-3.984367
Sum squared resid	0.285588	Schwarz criterion	-3.918084
Log likelihood	546.8739	Hannan-Quinn criter.	-3.957757
F-statistic	29.18325	Durbin-Watson stat	0.105316
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7

Uji lagrange

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	604.1641 (0.0000)	18.25037 (0.0000)	622.4144 (0.0000)
Honda	24.57975 (0.0000)	4.272045 (0.0000)	20.40130 (0.0000)
King-Wu	24.57975 (0.0000)	4.272045 (0.0000)	14.16272 (0.0000)
Standardized Honda	26.54368 (0.0000)	4.957835 (0.0000)	17.99425 (0.0000)
Standardized King-Wu	26.54368 (0.0000)	4.957835 (0.0000)	12.05510 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	622.4144 (0.0000)

Lampiran 8

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.079900	4	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM	-0.002915	-0.003348	0.000000	0.1346
KEMISKINAN	0.003254	0.002132	0.000001	0.2357
PDRB	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0006
PENGANGGURAN	-0.000441	0.000060	0.000000	0.2594